

**AUDIT PIUTANG DAGANG PADA  
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
DEPDIKBUD KECAMATAN HARAU  
KABUPATEN 50 KOTA  
UNIT BANGUNAN**



**OLEH**

**MERY HARTATI  
05 087 023**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**





No. Alumni Universitas	MERY HARTATI	No. Alumni Fakultas 093
------------------------	--------------	----------------------------

a). Tempat/Tgl.lahir : Payakumbuh/10 Maret 1984 b). Nama Orang Tua : Musbar dan Zulnefti c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi e). NBP : 05087023 f). Tgl. Lulus : 31 Juli 2008 g). Prediket lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,16 i). Lama studi : 3 tahun j). Alamat orang tua : Jl. Rajawali no 26c Kel.Balai Baru Koto Nan Gedang Payakumbuh

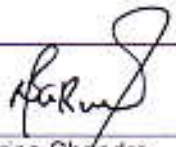

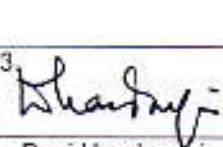
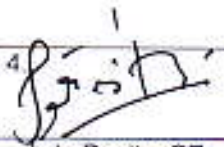
**Audit Piutang Dagang Pada  
KPRI DEPDIKBUD Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Unit Bangunan**  
Tugas Akhir oleh : Mery Hartati  
Pembimbing : 1. Irda Rosita, SE. Ak 2. Anda Dwi Haryadi, SE. Ak

**ABSTRAK**

Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. KPRI DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan merupakan badan usaha bersama yang dalam kegiatan operasionalnya sering melakukan transaksi penjualan secara kredit yang menimbulkan adanya akun piutang dagang. Akun ini termasuk akun yang cukup material yaitu sebesar 17,5% dari jumlah aktiva keseluruhan. Pemeriksaan terhadap akun piutang dagang meliputi evaluasi *internal control*, *compliance test*, *substantive test* dan *analytical review*. Dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa akun piutang dagang telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tugas akhir ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2008. Abstrak ini telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	Novrina Chandra, SE. MM. Ak	Gustati, SE. Ak	Desi Handayani, SE. AK	Irda Rosita, SE. Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Endrawati, SE. Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Nomor Alumni	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas : 093	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Transaksi secara kredit terjadi di berbagai jenis barang. Mulai dari barang kebutuhan pokok hingga barang lux (barang- barang mewah). Tidak terkecuali pada bahan bangunan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga melakukan hal yang sama dalam menyikapi keadaan perekonomian yang tidak menentu ini. Maka seiring perkembangannya, selain memiliki unit simpan pinjam dan warung serba ada (waserba), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota juga membuka unit bangunan, fotocopy dan studio photo pada tahun 2005. Hal ini juga merupakan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan utama koperasi ini yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam kegiatan operasionalnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya unit bangunan juga melaksanakan penjualan secara kredit, baik kepada anggotanya maupun pada masyarakat luas. Secara otomatis penjualan secara kredit tersebut menimbulkan piutang dagang bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan. Dalam survey awal yang Penulis lakukan di KPRI DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan, diketahui bahwa dalam laporan keuangan tahun 2007 yang terdapat dalam laporan pertanggung jawaban pengurus dan

badan pengawas tahun buku 2007, akun piutang termasuk salah satu akun yang nilainya sangat material dalam neraca yaitu sebesar 17,5 % dari jumlah akun aktiva keseluruhan. Di samping itu, adanya akses manager yang sangat besar dalam operasional koperasi dan tidak adanya pemisahan fungsi bagian penjualan, bagian akuntansi dan bagian gudang memungkinkan terjadinya kesalahan, salah satunya terhadap akun piutang. Informasi lain ditemukan di lapangan bahwasanya terdapat beberapa orang debitur yang memiliki hutang lebih dari satu periode akuntansi. Namun disisi lain perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak membuatkan penyisihan piutang tak tertagih (*allowance for bad debt*). Sesuai dengan notulen RAT bulan Maret 2008 diputuskan bahwa akan dikenakan denda bagi debitur jika tidak membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2% dari jumlah angsuran dan koperasi berhak melakukan pemotongan gaji melalui bendaharawan gaji jika debitur tidak juga melunasi hutangnya demi kelancaran usaha bersama tersebut.

Oleh karena itu Penulis sangat tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh tentang hal yang berhubungan dengan pengelolaan piutang dagang pada unit bangunan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIBUD ini dan membahasnya lebih dalam Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Audit Piutang Dagang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan”**

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah pokok yang diangkat diantaranya :

1. Apakah terdapat pengendalian intern (*Internal Control*) yang baik atas piutang dagang beserta transaksi penjualan dan penerimaan kas di

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan ?

2. Bagaimana *validity* (keabsahan) dan *authenticity* (keotentikan) dari akun piutang dagang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan ?
3. Apakah terdapat *collectibility* (kemungkinan tertagihnya) piutang yang cukup besar dan apakah terdapat dana yang cukup pada perkiraan *allowance for bad debt* (penyisihan piutang tak tertagih) ?
4. Apakah penyajian piutang dagang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia ?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat penerapan pengendalian intern (*internal control*) yang baik atas piutang dagang beserta transaksi penjualan dan penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan. .
2. Untuk memeriksa *validity* (keabsahan) dan *authenticity* (keotentikan) dari akun piutang dagang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan.

## BAB LIMA

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Setelah melakukan audit terhadap piutang dari KPRI DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan ini Penulis mendapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Belum terdapatnya *Internal Control* yang baik atas piutang dagang beserta transaksi penjualan dan penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan. Karena, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya *Internal Control* bertujuan untuk menjaga harta perusahaan dari segala bentuk penyimpangan dan kesalahan. Namun yang ditemukan di lapangan masih terdapat peluang yang bisa memberi kesempatan untuk terjadinya hal tersebut. Salah satunya adalah besarnya akses manager terhadap semua bagian yang terdapat pada KPRI DEPDIKBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan ini. Termasuk didalamnya akses terhadap pembukuan. Sehingga terdapat peluang yang sangat besar untuk terjadinya penyimpangan
2. *Validity* (keabsahan) dan *authenticity* (keotentikan) dari akun piutang dagang dapat dipertanggung jawabkan karena didukung oleh bukti pendukung serta data yang lengkap. Namun perlu ditambahkan lagi bukti pendukung guna melengkapi dokumen yang ada.

3. Collectibility (kemungkinan tertagihnya ) piutang cukup besar mengingat para debitur adalah anggota dari Koperasi Pegawai republik Indonesia (KPRI) DEPDIBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan pegawai negeri (Guru SD) sehingga piutang tersebut dapat ditagih melalui bendaharawan gaji masing-masing atas persetujuan debitur. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketegasan pihak pengelola. Sehingga para debitur menyadari kelalaian mereka demi kelancaran usaha bersama ini.
4. Penyajian akun piutang dagang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DEPDIBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Unit Bangunan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia. Namun perlu diperhatikan lagi spesifikasi atau pembagian atas piutang itu sendiri. Karena dari sampel yang diambil terdapat temuan adanya piutang karyawan yang dimasukkan ke piutang usaha.

## 5.2. SARAN

1. Sebaiknya pihak manajemen lebih memperhatikan masalah *Internal Control* untuk menjaga harta perusahaan demi terwujudnya tujuan utama perusahaan (KPRI DEPDIBUD Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ) yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Perlu ketegasan dari pihak pengelola dalam menagih piutang pada para debitur guna meningkatkan kelancaran perputaran uang, sehingga perkembangan usaha bisa tercapai.

## DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. (2004) *Auditing ( Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik jilid 1*. edisi ketiga . Jakarta : FEUI..
- Haryadi, Anda Dwi (2007). Modul Bahan Ajar Auditing. Padang : Politeknik Negeri Padang.
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia DEPDIBUD Kecamatan Harau (2007). *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2007*.
- Mulyadi.(2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Soemarso SR. (2003). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku Dua Edisi Lima.(Revisi): Jakarta. Salemba Empat.
- (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku satu Edisi Lima(Revisi): Jakarta. Salemba Empat.